

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP KETENTUAN ADAT
MAHAR Rp.50.000,00 DI DUSUN JOGODAYOH DESA JABON
KECAMATAN MOJOANYAR KABUPATEN MOJOKERTO**

SKRIPSI

Oleh:

Dinda Mir'atu Hayati

NIM. C91215046



Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Prodi Hukum Keluarga Islam

Surabaya

2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dinda Mir'atu Hayati
NIM : C91215046
Fa kultas/Jurusan/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Perdata Islam/
Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam Terhadap Ketentuan Adat
Mahar Rp.50.000,00 di Dusun Jogodayoh Desa
Jabon Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian tertentu yang sudah dilengkapi dengan sumber rujukan.

Surabaya, 11 Juni 2019

Saya yang menyatakan,



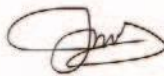
Dinda Mir'atu Hayati
NIM. C91215046

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul "Analisis Hukum Islam Terhadap Ketentuan Adat Mahar Rp.50.000,00 di Dusun Jogodayoh Desa Jabon Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto" yang ditulis oleh Dinda Mir'atu Hayati NIM. C91215046 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 11 Juni 2019

Pembimbing



Dr. H. Abdul Basith Junaidy, M.Ag.
NIP. 197110212001121002

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Dinda Mir'atu Hayati NIM. C9121546 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqash Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UTN Sunan Ampel pada hari Selasa 09 Juli 2019, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

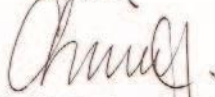
Majelis Munaqash Skripsi

Penguji I,



Dr. H. Abdul Basith Jumaidy, M.Ag.
NIP. 197110212001121002

Penguji II,



Dra. Siti Dalilah Candrawati, M. Ag.
NIP. 196006201989032001

Penguji III,



Hj. Nabilah Nailiy, S.SI., M.HI
NIP. 198102262005012003

Penguji IV,



Zakivatul Ulya, MHI.
NIP. 199007122015032008

Surabaya, 17 Juli 2019

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Dr. M. Masruhan, M. Ag.
NIP. 19590404198803



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Dinda Mir'atu Hayati
NIM : C'91215046
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam
E-mail address : dindamiratu@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Ipsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)

yang berjudul :

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP KETENTUAN ADAT MAHAR Rp.
50.000,00 DI DUSUN JOGODAYOH DESA JABON KECAMATAN MOJOANYAR
KABUPATEN MOJOKERTO**

Berserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 22 Juli 2019

Penulis

(Dinda Mir'atu Hayati)

ABSTRAK

Skripsi dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Ketentuan Mahar Rp.50.000,00 di Dusun Jogodayoh Desa Jabon Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto” adalah hasil penelitian lapangan yang difokuskan pada dua rumusan masalah tentang bagaimana ketentuan adat tentang pemberian mahar Rp.50.000,00 di Dusun Jogodayoh Desa Jabon Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto dan bagaimana kesesuaian ketentuan adat mahar Rp.50.000,00 di Dusun Jogodayoh Desa Jabon Kecamatan Mojoayr Kabupaten Mojokerto dengan ketentuan mahar dalam Hukum Islam.

Data dianalisis melalui observasi lapangan, wawancara dan dokumentasi. Data yang terkumpulkan kemudian diolah dengan teknik *editing* dan *organizing*, selanjutnya, dianalisis menggunakan metode deskripsi dengan pola pikir induktif yakni menggambarkan hasil penelitian secara sistematis dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi, kemudian memberikan pemecahan persoalan dengan teori yang bersifat umum.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa ketentuan adat Rp.50.000,00 di Dusun Jogodayoh Desa Jabon Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto dilatarbelakangi adanya anjuran dari kyai Khusairi yang merupakan kyai dari kebanyakan masyarakat Dusun Jogodayoh tersebut. Dalam pelaksanaan pemberian mahar Rp.50.000,00 harus ada kesepakatan antara kedua belah pihak. Pemberian mahar Rp.50.000,00 di Dusun Jogodayoh sesuai dengan pendapat jumhur ulama karena tidak ada batasan mengenai jumlah mahar. Akan tetapi, bertentangan dengan pendapat Imam Malik dan Imam Abu Hanifah karena terdapat batasan mahar sebesar tiga dirham perak menurut Imam Malik dan sebesar sepuluh dirham menurut Imam Abu Hanifah. Adapun menurut penulis, mahar Rp.50.000,00 tidak memenuhi syarat mahar karena tidak lagi berharga di zaman sekarang.

Dari hasil penelitian di atas, maka disarankan kepada tokoh agama, masyarakat yang berpendidikan, lembaga urusan agama, dan lembaga yang berwenang dalam hal perkawinan agar memberi wawasan yang lebih terhadap masyarakat mengenai perkawinan khususnya mengenai mahar dalam perkawinan. Selain itu, kepada masyarakat Dusun Jogodayoh diharapkan lebih mempertimbangkan lagi mengenai nilai mahar yang akan diberikan kepada calon istrinya.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah menciptakan makhluk dengan berbagai macam makhluk hidup, khususnya manusia yang berpasang-pasangan. Allah menciptakan manusia ada dua macam yaitu laki-laki dan perempuan. Mereka diciptakan supaya saling mengenal dan saling melindungi antara satu dengan lainnya. Setiap manusia, secara naluri membutuhkan pendamping hidup yang dapat saling mengisi dan melindungi. Perasaan antara dua manusia ini ada dan mereka menemukan pasangan yang cocok, maka tumbuhlah rasa cinta dan kasih sayang di antara mereka. Maka dari itu, Allah mewajibkan kepada umat manusia untuk menikah, untuk melengkapi hidupnya.¹

Pernikahan merupakan *sunnahullāh* yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Allah mewajibkan makhluk-Nya untuk menikah agar bisa berkembang biak, dan itulah cara yang dipilih Allah untuk makhluk-Nya. Pernikahan akan berperan dan berjalan dengan baik apabila masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan dan pernikahan itu sendiri.² Allah berfirman dalam Surah An-Nisā' ayat 1 yang berbunyi:

¹ Nasiri, *Kapita Selekt Perkawinan* (Jakarta: Ihya Media, 2016), 1.

² Slamet Abidin, *Fiqih Munakahat 1* (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), 9.

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan dari padanya Allah menciptakan istrinya, dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu”.¹

Ini adalah perintah dari Allah yang mewajibkan seorang muslim untuk menikah, dan Allah menunjukkannya kepada perempuan yang ia senangi dan agumi, yaitu: “yang membuatnya bahagia jika dia melihatnya, yang patuhnya jika dia menyuruhnya dan tidak melanggar apa yang disukai suaminya pada dirinya dan harta suaminya”.²

Allah mendorong manusia untuk membentuk keluarga, karena keluarga menjadi pemenuhan keinginan manusia, tanpa menghilangkan kebutuhannya, keluarga juga yang selalu dibutuhkan di setiap ada konflik di dalam kehidupan. Keluarga merupakan tempat fitrah yang sesuai dengan keinginan Allah bagi kehidupan manusia sejak keberadaan khalifah,³ Allah berfirman:

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً
 “Dan sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum
 kamu dan Kami memberikan kepada mereka istri-istri dan keturunan”.
 (QS. Ar-Ra’d (13): 38).⁴

“Dan sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan Kami memberikan kepada mereka istri-istri dan keturunan”. (QS. Ar-Ra’d (13): 38).⁴

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُفْسِدُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinlah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut akan dapat berlaku adil, maka (kawinlah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”.⁷

Dalam Pasal 2 Bab II dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsāqan ghalīdhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Pada pasal 3 menyebutkan tujuan perkawinan yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.⁸

Menurut Anwar Haryono perkawinan adalah suatu perjanjian yang suci antara seorang laki-laki dengan seorang wanita untuk membangun dan

⁵ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Bogor: Pustaka Media, 2003), 07.

⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2009), 35.

⁷ Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan...*, 77.

⁸ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Akademika Pressindo, 2015), 114.

1. Perjanjian yang suci antara seorang pria dengan seorang wanita.
2. Membentuk keluarga bahagia dan sejahtera.
3. Kebahagiaan yang kekal abadi penuh kesempurnaan baik moral materil maupun spiritual.⁹

Para ulama tidak berbeda pendapat mengenai anjuran untuk menikah. Adanya anjuran untuk menikah banyak mengandung keutamaan dan mendatangkan faedah-faedah, yaitu melahirkan anak, karena salah satu tujuan menikah adalah memiliki keturunan dan menjaga keturunan. Menikah sama halnya seperti mengundang kecintaan Allah kepada manusia, karena manusia sudah berusaha untuk menjaga keturunannya.¹⁰

Dalam hukum Islam apabila perkawinan itu sudah berlangsung sempurna secara syar'i maka pada saat akad berlangsung masing-masing pihak yang melakukan akad akan meminta hak bagi istri terhadap suaminya yang berupa mahar.¹¹ Seperti dalam surah An-Nisā' ayat 4:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

“Berikanlah mas kawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan, kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang

⁹ Moch. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), 45.

¹⁰ Al-Imām Ibnu Qudamāh, Al-Maqdiṣi, *Mukhtaṣar Minhājul Qāṣidīn*, terj. Izzudin Karimi (Jakarta: Dārul Haq, 2012), 135.

¹¹ Darmawan, *Eksistensi Mahar dan Walimah* (Surabaya: Srikandi, 2007), 01.

berbentuk barang, uang, atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.¹⁸

Menurut syariah, keharusan membayar mahar itu dibebaskan kepada pihak laki-laki bukan kepada pihak perempuan. Menurut Abu Zahrah, penyebab laki-laki yang diharuskan membayar mahar karena laki-laki yang mempunyai kewajiban untuk mencari nafkah untuk keluarganya, sedangkan perempuan tugasnya mengurus rumah tangga. Mahar itu termasuk hak seorang wanita sebagai suatu tanda bahwa sejak akad dilaksanakan dia mempunyai hak milik yang sebelumnya tidak dipunyai. Hal ini berarti mengangkat derajat kaum wanita atas kedudukan sosial dalam masyarakat.¹⁹

Mahar mempunyai syarat-syarat yang harus dipenuhi yaitu:

1. Mahar berupa harta atau benda yang berharga, tidak sah mahar dengan yang tidak memiliki harga apalagi sedikit, walaupun tidak ada ketentuan banyak sedikitnya mahar. Akan tetapi, apabila mahar sedikit tetapi memiliki nilai, maka tetap sah.
2. Barangnya suci dan bisa diambil manfaat, tidak sah mahar dengan khamar, babi, atau darah, karena semua itu haram dan tidak berharga.
3. Barangnya bukan barang *ghasab*. *Ghasab* artinya mengambil barang milik orang lain tanpa seizin pemiliknya, namun tidak bermaksud untuk memiliki barang tersebut karena berniat untuk mengembalikannya kelak. Memberikan mahar dengan hasil *ghasab* adalah tidak sah, akan tetapi akadnya tetap sah.

¹⁸ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam...*, 113.

¹⁹ Darmawan, *Eksistensi Mahar dan Walimah...*, 2.

4. Bukan barang yang tidak jelas keadaannya. Tidak sah mahar dengan memberikan barang yang tidak jelas keadaannya, atau tidak disebutkan jenisnya.²⁰

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ عَمْرِو بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْزَرَ نِكَاحَ امْرَأَةٍ عَلَى نَعْلَيْنِ. أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ، وَخُوْلِفَ فِي ذَلِكَ.

“Dari Abdullah bin Amir bin Rabi’ah, dari ayahnya bahwa Nabi membolehkan menikah dengan seorang wanita dengan mas kawin dua buah sandal”.²⁴

Apabila jumlah mahar ditentukan secara tetap, maka memberikan gambaran bahwa perkawinan dianggap sebagai sesuatu yang sulit karena adanya ketentuan jumlah mahar, paling tidak dilihat secara ekonomis maka mereka tentu akan memilih membeli seorang budak dari pada membayar mahar yang cukup tinggi.²⁵

Sedangkan ketentuan mahar yang terjadi di Dusun Jogodayoh Desa Jabon Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto tidak seperti mahar pada umumnya, di desa tersebut memiliki ketentuan sendiri mengenai jumlah

²⁴ Muhammad bin Ismā'il Al-Amīr Aṣ-Ṣan'ani, *Subulus Salām*, terj. Ali Nur Medan, et al., (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2015), 718.

²⁵ Hammudah 'Abd. Al 'Ati, *Keluarga Muslim* (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1984), 86.

Masyarakat Dusun Jogodayoh Desa Jabon menentukan jumlah mahar untuk setiap masyarakat yang menikah dengan masyarakat Dusun Jogodayoh, baik laki-laki maupun perempuan ketentuannya sama saja. Masyarakat Dusun Jogodayoh menentukan jumlah mahar yaitu uang Rp.50.000,00. Masyarakat Dusun Jogodayoh dulunya menggunakan ketentuan mahar tersebut, akan tetapi masyarakat Dusun Jogodayoh sekarang sudah banyak yang tidak memakai ketentuan itu. Pada zaman sekarang orang memandang uang Rp.50.000,00 itu termasuk uang yang sedikit. Terlebih di zaman sekarang sudah banyak para pemuda yang sudah berpendidikan dan tidak hanya memakai patokan atau ketentuan yang ada.²⁷

Dalam kasus ini yang diangkat yaitu pemberian mahar Rp.50.000,00 di Dusun Jogodayoh apakah menggunakan mahar Rp.50.000,00 bertentangan dengan hukum Islam. Maka dari itu, akan dikaji menggunakan hukum Islam. Pandangan hukum Islam dengan adanya mahar Rp.50.000,00 di Dusun

²⁷ M. Rizqi Afandi, *Wawancara*, Kabupaten Mojokerto, 14 September 2018.

Jogodayoh yaitu menggunakan hukum Islam dari pandangan Nabi Muhammad, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Hanafi dan juga dalam Kompilasi Hukum Islam. Alasan penulis mengangkat kasus ini karena menurut penulis kasus ini memang pantas untuk dikaji, agar tahu bahwa menggunakan mahar Rp.50.000,00 itu kurang berharga untuk zaman sekarang, dan agar tahu pandangan hukum Islam mengenai mahar Rp.50.000,00 di Dusun Jogodayoh.

Ada beberapa pendapat mengenai batasan jumlah mahar. Adanya mahar Rp.50.000,00 juga masih kurang dari batasan yang ditentukan oleh Imam Maliki dan juga Imam Hanafi. Pada zaman sekarang Rp.50.000,00 tidak berharga lagi, padahal di syarat-syarat mahar salah satunya adalah menggunakan harta atau barang yang berharga. Sedangkan uang Rp.50.000,00 tidak berharga lagi untuk zaman sekarang.

Hal inilah yang menyebabkan penyusun berinisiatif untuk melakukan penelitian dan akan menganalisa terhadap ketentuan mahar berupa uang Rp.50.000,00 menurut hukum Islam, dan akan menyusunnya ke dalam skripsi dengan judul *“Analisis Hukum Islam Terhadap Ketentuan Adat Mahar Rp.50.000,00 di Dusun Jogodayoh Desa Jabon Kecamatan Mojokerto”*.

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang penelitian yang sudah pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, sehingga tidak terjadi pengulangan penelitian yang sama. Di bawah ini akan disebutkan hasil penelitian yang membahas masalah tentang mahar:

1. Skripsi dari Slamet Nugroho yang berjudul “*Analisis Pendapat Imam Malik Tentang Mahar Sebagai Rukun Nikah*”. Skripsi ini berisi tentang pendapat Imam Malik mengenai mahar, apakah mahar termasuk rukun atau syarat sahnya nikah. Mahar menurut Imam Malik itu sebagai rukun nikah bukan syarat sahnya nikah. Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu hanya sama dalam membahas tentang mahar. Sedangkan perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dihasilkan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Mengetahui secara lebih mendalam tentang ketentuan adat mahar berupa uang Rp.50.000,00 di Dusun Jogodayoh Desa Jabon Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto.
2. Mengetahui kesesuaian ketentuan adat mahar Rp.50.000,00 di Dusun Jogodayoh Desa Jabon Kecamatan Kabupaten Mojokerto dengan ketentuan Hukum Islam.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk hal-hal sebagai berikut:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan yang berhubungan terhadap pemahaman hukum Islam dan perkawinan dengan mahar berupa uang Rp.50.000,00 serta menambah wawasan bagi penulis sendiri dan pembaca pada umumnya. Selain itu, dapat menjadi bahan rujukan dan referensi bagi para peneliti di masa yang akan datang.
2. Segi praktis, penelitian ini dapat memberikan manfaat praktis bagi upaya pemasyarakatan khususnya dalam sosialisasi pemahaman tentang hukum Islam dan memberikan pemahaman mengenai hukum yang berlaku, khususnya bagi yang mau melangsungkan perkawinan.

- 1) *Fiqih Islām Wa Adillatuhu* karya Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili.
- 2) *Fikih Sunnah* karya Sayyid Sabiq.
- 3) *Kompilasi Hukum Islam*.
- 4) Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*.
- 5) Sumber-sumber lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan beberapa teknik dalam pengumpulan data yaitu berupa:

³⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet III (Jakarta: UI-PRESS, 2008), 101.

[illegible]

Dokumentasi adalah salah satu kegiatan untuk mengumpulkan data-data yang berisi sejumlah fakta yang terkait dengan objek yang diteliti dan data yang tersimpan dalam bentuk dokumen-dokumen.³⁸ Dalam penelitian ini yang digunakan data-data tertulis seperti literatur-literatur mengenai mahar.

Data yang telah dikumpulkan kemudian diolah melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. *Editing*, yaitu memeriksa kembali semua data yang diperoleh dengan memilih dan menyeleksi data tersebut dari berbagai segi yang meliputi kesesuaian, keselarasan satu dengan yang lainnya, keaslian, kejelasan serta relevansinya dengan permasalahan.³⁹ Jadi, penulis akan

³⁹ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 91.

5. Teknik Analisa Data

Penganalisaan data ini merupakan tahap yang sangat penting, data yang akan diolah dan dianalisa guna memecahkan dan menjelaskan masalah yang dikemukakan. Analisa data dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode teknik deskripsi. Teknik deskripsi yaitu menjelaskan permasalahan secara sistematis sesuai dengan data hasil

⁴¹ Masrukan, *Metodologi Penelitian Hukum...*, 205.

Untuk memudahkan pembahasan, maka kajian itu ditata dengan sistematika sebagai berikut:

Bab kedua merupakan bab pembahasan, berisi landasan teori tentang konsep mahar dalam hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Meliputi manfaat mahar, dasar hukum mahar nikah, bentuk dan jenis mahar, syarat-syarat mahar, dan kadar mahar.

[illegible]

biografi mempelai, tujuan atau faktor pelaku dalam pemberian mahar berupa uang Rp.50.000,00, dampak negatif dan positif adanya mahar Rp.50.000,00 serta penjelasan alasan kenapa sebagian masyarakat Dusun Jogodayoh Desa Jabon Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto ini ada yang tidak menetapkan mahar Rp.50.000,00 sehingga mulai berkurang masyarakat yang melangsungkan pernikahan menggunakan mahar Rp.50.000,00.

Bab keempat, menjelaskan tentang kesesuaian terhadap hasil penelitian mahar berupa uang Rp.50.000,00 yang diperoleh dari data wawancara kemudian dianalisis dengan literatur yang berkaitan dengan masalah yang diangkat dalam skripsi ini, sehingga bisa diambil kesimpulan bagaimana tinjauan hukum Islam mengenai pemberian mahar berupa uang Rp.50.000,00.

Bab kelima, merupakan bab penutup yang berisi mengenai kesimpulan dan saran yang bermanfaat bagi penelitian berikutnya dan bagi masyarakat pada umumnya.

- 1) Menurut madzhab Syafi'i mahar adalah sesuatu yang wajib diberikan oleh seorang lelaki kepada seorang perempuan untuk dapat menguasai seluruh anggota badanya.³
- 2) Menurut madzhab Hanafi mahar adalah sesuatu yang didapatkan seorang perempuan akibat akad pernikahan ataupun persetubuhan.⁴
- 3) Menurut madzhab Hambali mahar itu sebagai pengganti dalam akad pernikahan, baik mahar ditentukan di dalam akad, atau ditetapkan setelahnya akad dengan keridhoan kedua belah pihak atau hakim.⁵
- 4) Menurut madzhab Maliki mahar adalah sesuatu yang diberikan kepada seorang istri sebagai imbalan persetubuhan dengannya.⁶
- 5) Dalam pasal 1 sub d Kompilasi Hukum Islam (KHI), mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.⁷

Abdullah Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenada Media, 2003), 84.
 Abbidin dan Aminudin, *Fiqh Munakahat 1* (Bandung: CV.Pustaka Setia, 1999), 106.
 Az-Zuhaili, *Fiqh Islām Wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyic Al-Kattan (Jakarta: Gema, 2011), 230.
 Ghazali, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Akademika Pressindo, 2015), 113.

⁷ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Akademika Pressindo, 2015), 113.

yang wajib diberikan oleh calon suami kepada calon istri yang diakibatkan adanya sebuah pernikahan.

2. Dasar Hukum Mahar

Definisi yang sudah dijelaskan di atas, bahwa hukum mahar adalah wajib, dengan arti laki-laki yang mengawini seorang perempuan wajib menyerahkan mahar kepada istrinya. Dasar wajibnya menyerahkan mahar bagi suami kepada istrinya ditetapkan dalam Al-Quran dan dalam hadits Nabi. Dalil dalam ayat Al-Quran terdapat dalam surah An-Nisā' (4) ayat 24 yang berbunyi:

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ
أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً
وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

“Dan diharamkan juga kamu mengawini wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari istri-istri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka istri-istri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana”.⁸

Firman Allah dalam surah An-Nisa' (4) ayat 25:

وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكَحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ
فَتْيَانِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَاذْكُرُوهُنَّ بِأَدْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ
أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أُحْصِنَ فَإِنَّ أَتَيْنَ

⁸ Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan* (Bandung: Mikraj Khazanah, 2014), 81.

بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ
تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

“Dan barang siapa diantara kamu tidak mempunyai biaya untuk menikahi perempuan merdeka yang beriman, maka (dihalalkan menikahi perempuan) yang beriman dari hamba sahaya yang kamu miliki. Allah mengetahui keimanamu. Sebagian dari kamu adalah dari sebagian yang lain (sama-sama keturunan Adam-Hawa), karena itu nikahilah mereka dengan izin tuannya dan berilah mereka mas kawin yang pantas, karena mereka adalah perempuan-perempuan yang memelihara diri, bukan pezina dan bukan (pula) perempuan yang mengambil laki-laki sebagai piaraannya. Apabila mereka sudah berumah tangga (bersuami), tetapi melakukan perbuatan keji (zina), maka (hukuman) bagi mereka setengah dari apa (hukuman) perempuan-perempuan merdeka (yang tidak bersuami). (Kebolehan menikahi hamba sahaya) itu adalah bagi orang-orang yang takut terhadap kesulitan dalam menjaga diri (dari perbuatan zina). Tetapi jika kamu bersabar, itu lebih baik bagimu. Allah Maha Pengampun, maha penyayang”.⁹

Adapun dalil dari hadits di antaranya adalah sabda Nabi yaitu:

وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ قَالَ: زَوَّجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا امْرَأَةً بِحَاطِمٍ مِنْ حَدِيدٍ. أَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ، وَهُوَ طَرَفٌ مِنَ الْحَدِيثِ الطَّوِيلِ الْمُتَقَدِّمِ فِي أَوَّلِ النِّكَاحِ.

“Dari Sahal Sa’ad Ra berkata: “Nabi Muhammad pernah menikahkan seorang laki-laki dengan wanita dengan mas kawin sebuah cincin dari besi. (HR.Al-Hakim).¹⁰

Ditetapkan dari Nabi bahwa perkawinan beliau tidak pernah terlepas dari mahar. Disunnahkan menentukan mahar di dalam akad karena pernikahan Rasulullah tidak pernah terlepas dari penentuan mahar dan karena penentuan ini dapat mencegah permusuhan.¹¹

Dari adanya perintah Allah dan perintah Nabi untuk memberikan mahar itu, maka ulama sepakat menetapkan hukum wajibnya memberikan

⁹ Ibid.

¹⁰ Muhammad Bin Ismail Al-Amīr Aṣ-Ṣanʿani, *Subulus Salām*, terj. Ali Nur Medan, et al., (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2015), 719.

¹¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islām Wa Adillatuhu...*, 232.

mahar kepada istri. Mereka sepakat menempatkannya sebagai syarat sah bagi suatu perkawinan, berarti apabila pernikahan tidak ada mahar, maka pernikahannya tidak sah.¹²

Dalam hukum Islam apabila perkawinan itu sudah berlangsung sempurna secara *shar'i* maka pada saat akad berlangsung masing-masing pihak yang melakukan akad akan meminta hak bagi istri terhadap suaminya yang berupa mahar.¹³ Seperti dalam surah An-Nisā' ayat 4:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

“Berikanlah mas kawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya”.¹⁴

B. Klasifikasi dan Kualifikasi Mahar

1. Klasifikasi Mahar

a. Mahar *musammā*

Mahar *musammā* adalah mahar yang sudah disebut atau dijanjikan kadar dan besarnya ketika akad nikah. Jika akad nikah tidak disebutkan berapa besar jumlah yang diberikan kepada istri maka perkawinannya tetap sah, kemudian yang wajib atas suami adalah batasan mahar *mithil*.¹⁵

¹² Amir Syarifuddin, *Hukun Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 04), 87.

¹³ Darmawan, *Eksistensi Mahar dan Walimah* (Surabaya: Srikandi, 2007), 1.

¹⁴ Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan...*, 77.

¹⁵ Darmawan, *Eksistensi Mahar dan Walimah....*, 14.

Ulama fikih sepakat bahwa, dalam pelaksanaan mahar *musammā* harus diberikan secara penuh apabila:

- b. Mahar *mithil*

¹⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Indonesia...*, 89.
¹⁷ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 45.
¹⁸ Sayyid Sabiq, *Ringkasan Fiqih Sunnah* (Depok: Senja Media Utama, 2017), 404.

Mahar wajib diberikan di dalam perkawinan untuk menunjukan harga diri dan posisi perempuan. Dalam pernikahan apabila seorang laki-laki menikahi seorang perempuan yang maharnya kurang, maka laki-laki tersebut harus menyempurnakan maharnya untuk istrinya apabila dia sudah menyetubuhi istrinya tersebut, apabila istrinya belum disetubuhi suaminya, maka dikatakan kepadanya, apakah kamu sempurnakan maharnya atau kamu batalkan pernikahannya.³⁴

³² Ibid., 30.
³³ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat...*, 42.
³⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islām Wa Adillatuhu...*, 236.
³⁵ Darmawan, *Eksisistensi Mahar dan Walimah...*, 31.

Adapun hikmah disyariatkannya mahar adalah:

- a. Menunjukkan kemuliaan kaum perempuan. Hal ini menandakan bahwa merekalah yang dicari, bukan mencari, dan yang mencarinya adalah laki-laki, bukan dia yang berusaha mencari laki-laki. Seorang laki-lakilah yang berusaha dan mengeluarkan hartanya untuk mendapatkan seorang perempuan.
- b. Menampakkan cinta dan kasih sayang seorang suami kepada istrinya, yakni sebagai pemberian, hadiah, dan hibah, bukan sebagai pembayar harga seorang perempuan.
- c. Perlambang kesungguhan. Pemberian mahar menunjukkan bahwa laki-laki itu bersungguh-sungguh untuk menikahi seorang perempuan. Pernikahan bukan sekedar menjalin hubungan yang biasa, tetapi serius dalam menjalin hubungan keluarga.
- d. Islam meletakkan tanggung jawab keluarga di tangan laki-laki, karena kemampuan dalam mengendalikan perasaannya lebih besar dari pada perempuan. Laki-laki lebih bisa menjadi seorang pemimpin untuk mengatur kehidupan keluarganya.³⁹

³⁹ Yusuf Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer* (Jakarta: Gema Insani Press), 479.

c. Memberikan kemuliaan kepada perempuan

Semua ini menunjukkan bahwa Islam sangat memuliakan seorang perempuan. Memberikan tanggung jawab kepada laki-laki dalam memberikan mahar kepada perempuan itu juga menunjukkan keadilan Islam dalam memuliakan seorang perempuan. Hal ini sangat berbeda dengan zaman jahiliyyah yang tidak menghormati hak-hak perempuan,

⁴² Ibid., 45.

bahkan meletakkan perempuan pada kedudukan yang terendah dalam masyarakat.⁴³

C. Kedudukan Wanita

Sebelum Islam datang, perempuan sangatlah menderita karena tidak memiliki kebebasan hidup yang layak. Dalam peradaban romawi misalnya, wanita itu sepenuhnya berada di bawah kekuasaan ayahnya, setelah menikah kekuasaan tersebut pindah ke suaminya. Kekuasaan ini mencakup seperti menganiaya, menjual, mengusir dan lain sebagainya.⁴⁴

Ketika Islam datang, Islam sudah mengangkat posisi perempuan menjadi lebih tinggi, memberikan kehormatan, kebebasan dan memberikan hak pribadinya. Allah telah memberikan seorang perempuan hak untuk memilih baik dalam akidah, pernikahan, dan semua isi kehidupan lainnya, bahkan mereka diberi kebebasan dalam memiliki harta benda, hibah, dan lain sebagainya, bahkan tidak boleh ada pihak lain yang ikut campur kecuali setelah mendapat izin darinya. Ketika Islam datang, seorang perempuan diberikan bagian dalam mendapatkan warisan. Islam benar-benar telah menjaga hak-hak kaum perempuan.⁴⁵

Perempuan diberikan kebebasan secara penuh dalam menentukan pasangan hidupnya, maka sebuah pernikahan tidak akan terjadi apabila tidak ada izin darinya. Perempuan dan laki-laki mempunyai kedudukan yang sama

⁴³ Ibid., 46.

⁴⁴ Agustin Hanapi, “Peran Perempuan Dalam Islam”, *Gender Equality: Internasional Journal of Child and Gender Studies*, No. 1, Vol. 1 (Maret, 2015), 16.

⁴⁵ Syaikh Mutawalli Al-Sya'rawi, *Fikih Perempuan* (Jakarta: Amzah, 2003), 109.

1. Mempertahankan nama saat masa gadisnya, sebagai tanda kemandirian pribadinya.
2. Kekuasaan, menurut mayoritas mazhab fikih Islam, mengenai mengizinkan atau tidak mengizinkan *coitus interruptus* dalam soal perkawinan sebagai suatu metode kontrasepsi.
3. Hak atas cinta dan kasih yang lebih besar, sebagai ibu dari anak-anaknya.
4. Kemerdekaan ekonomi dan kapasitas hukum yang sama. Islam sudah memberikan kepada wanita kapasitas hukum yang sama dengan laki-laki.

Hal ini menunjukkan bahwa ia mempunyai kemampuan memasuki segala macam pengaturan perjanjian, dan menjalankan perusahaan atas namanya sendiri tanpa memerlukan persetujuan suaminya.⁴⁷

⁴⁶ Agustin Hanapi, *Peran Peremupan Dalam Islam...*, 17.

[illegible]

mempunyai hak dan kewajiban masing-masing. Dalam Q.S An-Nisā' ayat 1 menjelaskan bahwa laki-laki dan perempuan itu saling membutuhkan dan saling melengkapi.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا.

“Wahai manusia, bertakwalah kepada tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan Allah menciptakan pasangannya (Hawa) dari dirinya, dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu”.⁵¹

D. Mahar Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam

Dalam Kompilasi Hukum Islam, mahar tidak termasuk rukun nikah dan bukan termasuk syarat sah nikah, akan tetapi merupakan suatu kewajiban yang harus dipenuhi oleh calon suami kepada calon istrinya, baik diberikan secara langsung atau kontan maupun tidak dalam persetujuan yang sudah disetujui dari pihak calon istri.

Mahar diatur dalam pasal 30 sampai pasal 38 BAB V Kompilasi Hukum Islam, yang lebih jelasnya sebagai berikut:

Pasal 30 yaitu calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak.

⁵¹ Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan...*, 77.

B. Deskripsi Tentang Pemberian Mahar Berupa Uang Rp.50.000,00 di Desa Jogodayoh Desa Jabon Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto

Sejarah adanya mahar berupa uang Rp.50.000,00 ketika ada seorang kyai yang bernama Ahmad Khusairi. Kyai tersebut pernah berdakwah pada santri-santrinya mengenai pernikahan termasuk mahar. Kyai Khusairi tidak mempunyai keturunan, akan tetapi mempunyai anak angkat yang bernama Ainul Ghuri yang menjadi santri kyai Khusairi. Kyai Khusairi berasal dari Sidoarjo dan pernah mondok di Ploso Jombang. Kyai Khusairi juga sering berdakwa di berbagai tempat dan salah satunya di Mojokerto. Kyai Khusairi menetap di Desa Jabon Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto. Kyai Khusairi menetap di Mojokerto mendirikan pondok pesantren yang bernama Al-Khusairiyah yang terletak di Desa Jabon Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto.

⁴ Abdul Malik, *Wawancara*, Kabupaten Mojokerto, 12 April 2019.

[illegible]

⁶ Ibid.

penggunaan mahar yang telah dianjurkan oleh Kyai Khusairi dan Kyai Ainul Ghuri tersebut.⁷

Pemberian yang diberikan kepada calon istri, bukan hanya mahar yang diberikan ketika akad nikah, tapi dari pihak laki-laki juga membawa hantaran yang akan diberikan kepada pihak istri, seperti pakaian, makanan, dan perabotan. Ketentuan ini sudah menjadi adat Jawa, bukan ketentuan dari Dusun Jogodayoh. Selain memberikan mahar Rp.50.000,00 juga memberikan pemberian yang lain, seperti masyarakat di daerah lain pada umumnya. Pemberian yang ditentukan dan yang dianjurkan yang dimaksud oleh Kyai Khusairi dan Kyai Ainul Ghuri di Dusun Jogodayoh ini yaitu pemberian ketika akad nikah, bukan pemberian sebelum maupun sesudah akad nikah.

Zaman sekarang, sudah banyak warga atau santri-santri yang tidak menetapkan mahar dengan uang Rp.50.000,00 karena tidak sesuai dengan keinginan kedua mempelai, hal ini karena sudah ada kesepakatan di antara dua belah pihak. Pada zaman sekarang uang Rp.50.000,00 termasuk jumlah yang sedikit. Maka dari itu, warga atau santri-santrinya juga banyak yang tidak menetapkan mahar Rp.50.000,00.⁸

2. Biografi Mempelai

Ada beberapa pasangan suami istri yang menggunakan mahar uang dengan jumlah Rp.50.000,00 yaitu:

⁷ Ibid.

⁸ Ibid.

¹⁰ Khoirul Roziqin, *Wawancara*, Dusun Jogodayoh, 12 April 2019.

Tanggapan dari keluarga salah satunya yaitu Imam Jazuli. Imam Jazuli mengatakan bahwa di Dusun Jogodayoh kebanyakan adalah santri dari kyai Khusari, maka dari itu tidak heran apabila banyak yang menetapkan apa yang sudah dianjurkan kyai Khusairi. Menurut pak Imam Jazuli, tidak masalah apabila menggunakan mahar yang sedikit asalkan pihak pengantin wanitanya setuju, karena pengantin wanitanya yang akan diberi mahar. Apabila pengantin wanitanya tidak setuju, maka lebih baik

[illegible]

Sebelum acara di mulai, semua rombongan dari pihak perempuan dan pihak laki-laki sudah siap berada di tempat yang sudah disiapkan. Acara pertama yaitu melangsungkan akad nikah. Ijab kabul diawali dengan memberikan sambutan dari pihak laki-laki dan di balas sambutan dari pihak perempuan.¹⁶

Melangsungkan ijab kabul diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Quran dan melangsungkan *khutbah* nikah yang disampaikan oleh modin. Melaksanakan ijab kabul, ada yang diwakilkan modin dan ada juga yang dinikahkan sendiri oleh wali pengantin wanita. Ijab kabul mahar boleh disebutkan atau tidak disebutkan. Berlangsungnya ijab kabul pengantin pria memberikan mahar kepada pengantin wanita dan setelah pemberian

¹⁶ Ibid.

mahar, mempelai tanda tangan dan penyerahan buku nikah dari modin kepada kedua mempelai. Acara terakhir yakni nasihat dan doa.¹⁷

5. Faktor Pemberian Mahar Berupa Rp.50.000,00

- a. Merupakan kesepakatan antara pihak laki-laki dan pihak perempuan.
- b. Anjuran dari kyai untuk memberikan mahar yang sedikit.
- c. Memberikan mahar berupa uang Rp.50.000,00 agar istrinya bisa menghabiskan maharnya sekaligus tanpa tersisa.
- d. Menggunakan mahar berupa uang Rp.50.000,00 karena dikhawatirkan mahar istri ikut dirasakan oleh suami.¹⁸

6. Dampak Negatif Mahar Rp.50.000,00

- a. Seorang laki-laki bisa merendahkan kedudukan perempuan, karena bisa memberikan mahar yang sedikit kepada istri.
- b. Meremehkan adanya pernikahan karena memberikan mahar yang sedikit.
- c. Membuat suami dengan mudah menceraikan istrinya.
- d. Membuat seorang istri mendapatkan kerugian batin apabila keinginan istri tidak terpenuhi.¹⁹

7. Dampak Positif Mahar Rp.50.000,00

- Tidak memberatkan suami.
- Menjadikan istri seorang perempuan sebaik-baiknya perempuan.
- Mahar istri tidak akan dipakai oleh suami.
- Istri akan lebih mudah untuk menghabiskan mahar tersebut sekaligus.

¹⁷ Ibid.

¹⁸ Ibid.

¹⁹ Ibid.

adalah satri kyai Khusairi sendiri. Penetapan mahar dalam pernikahan di Dusun Jogodayoh ini ditetapkan oleh keluarga pihak laki-laki dan juga dari pihak perempuan, tentunya yang disepakati oleh kedua belah pihak pengantin laki-laki dan pengantin perempuan. Dalam kasus ini tidak memandang pihak laki-laki maupun perempuan dari keluarga yang terpandang, keluarga yang mampu, berpendidikan, atau yang lain. Maka dari itu, pemberian jumlah mahar akan tetap sedikit. Dalam penentuan jumlah mahar ini tetap menggunakan mahar dengan uang Rp.50.000,00 karena saran dari kyai yang ada di Dusun Jogodayoh Desa Jabon tersebut, bahwasannya mahar itu lebih baik sedikit.

Dalam Islam memang tidak ada batasan maksimal maupun minimal dalam jumlah mahar. Agama Islam menghendaki agar meluaskan jalan dan kesempatan kepada laki-laki dan perempuan untuk membangun sebuah keluarga. Perbedaan mengenai keadaan ekonomi setiap orang itu berbeda-beda, ada yang miskin dan juga ada yang kaya. Untuk mencapai hal ini, maka tidak lain dari pada harus memberikan jalan yang mudah sehingga orang-orang yang tidak mampu yang sulit mengeluarkan biaya yang cukup besar masih tetap bisa menikah. Maka dari itu, dalam Islam tidak ada batasan minimal atau maksimal dalam mahar agar pihak laki-laki tidak merasa keberatan untuk meminang.

Dampak positif dan negatif dari adanya ketentuan jumlah mahar seperti yang ada di Dusun Jogodayoh. Dampak positifnya adalah tidak memberatkan pihak laki-laki mengenai jumlah mahar, selain itu pihak laki-laki yang kurang

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Pemberian Mahar Berupa Uang Rp.50.000,00 di Dusun Jogodayoh Desa Jabon Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto

[illegible]

membedakan penerapan pada zaman jahiliyyah yang tidak menghargai hak perempuan. Hal ini bertujuan untuk memberikan penghargaan dan jaminan sosio ekonomi kepada perempuan. Kedua, yaitu memberikan jaminan sosial ekonomi kepada perempuan, yang mana mahar itu digambarkan melalui pemberian yang berpotensi sebagai jaminan sosial ekonomi, bahkan sebagai pelindung bagi perempuan, maka dari itu menurut penulis menggunakan mahar Rp.50.000,00 untuk zaman sekarang itu kurang dan tidak pantas. Tujuan disyariatkannya mahar yang terakhir yaitu memberikan kemuliaan kepada perempuan. Kedudukan perempuan sejak adanya Islam lebih terjamin dari pada zaman jahiliyyah, mereka menganggap bayaran perkawinan itu sebagai upah untuk membesarkan anak perempuan mereka. Islam memberikan tanggung jawab kepada laki-laki dalam memberikan mahar dengan tujuan untuk menunjukkan keadilan Islam dalam memuliakan perempuan. Oleh sebab itu, menurut penulis mahar Rp.50.000,00 itu tidak sesuai dengan adanya Islam dalam memuliakan perempuan dalam hal seorang laki-laki memberikan mahar kepada seorang perempuan, dan mahar Rp.50.000,00 itu kurang untuk memuliakan seorang perempuan, apalagi untuk perempuan yang berpendidikan.

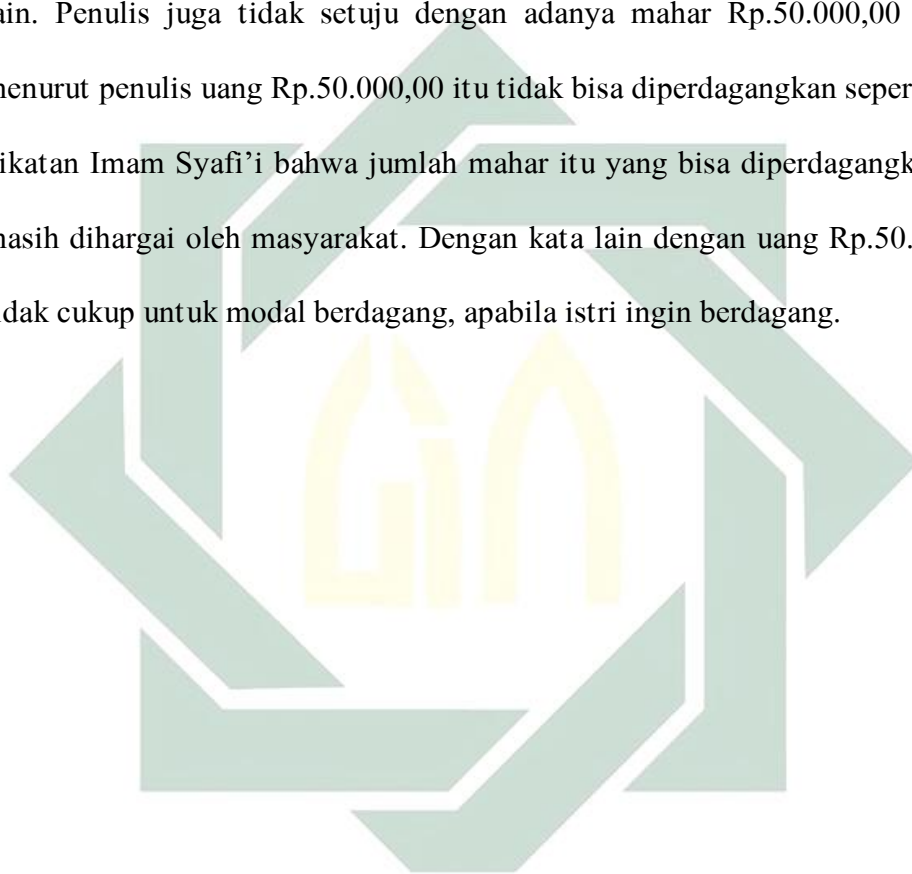
Jika jumlah mahar ditetapkan sebanyak Rp.50.000,00 dengan tujuan agar berbeda dari mahar pada umumnya maka, mahar tersebut belum memenuhi syarat-syarat mahar yang telah ditentukan oleh Islam, karena di dalam syarat-syarat mahar salah satunya adalah harta atau barang yang

berharga, sedangkan mahar dengan uang Rp.50.000,00 menurut penulis tidak berharga jika dilihat dari zaman sekarang.

Mahar dengan uang Rp.50.000,00 untuk zaman sekarang, menurut penulis itu masih kurang, karena hanya bisa dibelanjakan satu kali saja dan itu hanya mendapatkan barang kecil. Jumlah mahar Rp.50.000,00 tidak bisa memenuhi apa yang diinginkan oleh istrinya. Misalkan, istri ingin membeli barang, akan tetapi suami tidak memiliki uang atau istrinya malu untuk meminta uang, maka istrinya tidak bisa menggunakan uang maharnya untuk membeli barang yang diinginkannya dikarenakan tidak cukup. Pada kasus ketentuan mahar Rp.50.000,00 di Dusun Jogodayoh ini karena istri agar bisa menghabiskan uang mahar tersebut sekaligus, dan agar hanya dipakai oleh istrinya, akan tetapi kembali lagi pada jumlah kebutuhan seorang istri secara pribadi juga tidak sedikit. Mahar Rp.50.000,00 untuk zaman sekarang khususnya untuk perempuan yang berpendidikan, menurut penulis masih kurang, dan jumlah mahar Rp.50.000,00 itu sangat sedikit. Pada zaman sekarang juga banyak perempuan yang juga ingin bekerja sendiri. Hal ini tidak berarti mahar seorang perempuan untuk zaman sekarang itu harus mahal, banyak dan sebagainya. Uang Rp.50.000,00 di zaman sekarang termasuk sedikit.

Jadi menurut penulis, bahwasannya memberikan mahar kepada istrinya sebesar Rp.50.000,00 boleh karena termasuk asas kesederhanaan dan kemudahan dalam mahar seperti pada Pasal 31 Bab V Kompilasi Hukum Islam. Batasan jumlah mahar dalam Islam itu diperbolehkan karena dalam

Islam tidak ada batasannya. Penulis tidak setuju dengan adanya mahar Rp.50.000,00 karena tidak sesuai dengan adanya tujuan disyariatkannya mahar yang mana sangat memuliakan seorang perempuan. Dilihat dari kedudukan perempuannya, dilihat dari segi pendidikan, pekerjaan atau yang lain. Penulis juga tidak setuju dengan adanya mahar Rp.50.000,00 karena menurut penulis uang Rp.50.000,00 itu tidak bisa diperdagangkan seperti yang dikatakan Imam Syafi'i bahwa jumlah mahar itu yang bisa diperdagangkan dan masih dihargai oleh masyarakat. Dengan kata lain dengan uang Rp.50.000,00 tidak cukup untuk modal berdagang, apabila istri ingin berdagang.



B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan beberapa saran yang diantaranya:

1. Kepada tokoh agama, masyarakat yang berpendidikan, lembaga urusan agama, dan lembaga yang berwenang dalam hal perkawinan agar memberi wawasan yang lebih terhadap masyarakat mengenai perkawinan khususnya mengenai mahar dalam perkawinan.
2. Kepada masyarakat Dusun Jogodayoh diharapkan lebih mempertimbangkan lagi mengenai nilai mahar yang akan diberikan kepada calon istrinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Slamet. *Fiqh Munakahat 1*. Bandung: CV Pustaka Setia, 1999.
- Abbidin, Slamet dan Aminudin. *Fiqh Munakahat 1*. Bandung: CV.Pustaka Setia, 1999.
- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Akademika Pressindo, 2015.
- ‘Ati (al), Hammudah ‘Abd. *Keluarga Muslim*. Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1984.
- Azwar, Syaifuddin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Bahtiar, Wardi. *Metodologi Ilmu Dakwah*. Jakarta: Logos, 2001.
- Daraquthni (ad), Ali bin Umar. *Sunan Ad-Daraquthni*. Jakarta: Pusta Azzam, 2008.
- Darmawan. *Eksistensi Mahar dan Walimah*. Surabaya: Srikandi, 2007.
- Ghazaly, Abd. Rahman. *Fiqh Munakahat*. Bogor: Pernada Media, 2003.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Adat*. Bandung, Citra Aditya Bakti, 1977.
- Hanapi, Agustin. “Peran Perempuan Dalam Islam”. *Gender Equality: Internasional Journal of Child and Gender Studies*, No. 1, Vol. I, Maret, 2015.
- Iryani, Eva.”Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia”, *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, No. 2, Vol. 17, 2017.
- Kementrian Agama RI. *Alquran dan Terjemahan*. Bandung: Mikraj Khazanah Ilmu, 2014.
- Mahalli, A. Mudjab. *Menikahlah, Engkau Menjadi Kaya*. Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2001.
- Maqdisi (al), Al-Imam Ibnu Qudamah. *Mukhtashar Minhajul Qashidin* Jakarta: Darul Haq, 2012.
- Masruhan. *Metodologi Penelitian Hukum*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.
- Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004 .
- Nasiri. *Kapita Selekta Perkawinan*. Jakarta: Ihya Media, 2016.

- Nensi, Suria. "Persepsi Masyarakat Terhadap Mahar dan Uang Pana'i Pada Adat Pernikahan di Desa Tanete Kabupaten Gowa". Skripsi--Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar, 2017.
- Nugroho, Slamet. Analisis Pendapat Imam Malik Tentang Mahar Sebagai Rukun Nikah. Skripsi--Institut Agama Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2014.
- Nurboko, Cholid dan Abu Ahmad. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 1997.
- Qardhawi, Yusuf. *Fatwa-Fatwa Konteporer*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Ramulyo, Moch. Idris. *H. Perkawinan, H. Kewarisan, H. Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Sinar Grafika, 1995.
- Sabiq, Sayyid. *Ringkasan Fiqih Sunnah*. Depok: Senja Media Utama, 2017.
- Saebani, Beni Ahmad. *Perkawinan dalam Hukum Islam dan Undang-Undang*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2007.
- Shan'ani (as), Muhammad bin Ismail Al-Amir. *Subulus Salam*. Jakarta: Darus Sunnah Press, 2015.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-PRESS, Cet III, 2008.
- Subki (as), Ali Yusuf. *Fiqh Keluarga*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Sya'rawi (as), Syaikh Mutawalli. *Fikih Perempuan*. Jakarta: Amzah, 2003.
- Syafa'at, Abdul Kholiq. *Hukum Keluarga Islam*. Surabaya: UINSA Press, 2014.
- Syarifah, Andi Rifaa'atusy. "Perspsi Masyarakat Terhadap Mahar dan Uang Acara (Do'i Menre) Dalam Adat Pernikahan Masyarakat Bugis di Desa Watutoa Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng". Skripsi--Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar, 2010 .
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media, 2009.
- Syawqi, Abdul Haq. "Mahar dan Harga Diri Perempuan (Studi Kasus Pasangan Suami Istri di Kecamatan Singosari dan Kecamatan Dampit Kabupaten Malang". Tesis--Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2016.
- Tihani dan Sohri Sahrani. *Fikih Munakahat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- 'Umran, Abd. Al-Rahim. *Islam dan KB*. Jakarta: Lentera Basritama, 1997.
- Washfi, Muhammad. *Mencapai Keluarga Barokah*. Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2005.

